

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAPORAN DAN PEMINTAAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| Draf Peraturan | | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Batang Tubuh | Penjelasan |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |
| 1. bahwa landasan hukum untuk pengaturan dan pengawasan terhadap pelaporan data transaksi pendanaan bagi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum; | Perkembangan LPBBTI sebagai bagian dari inovasi sektor jasa keuangan digital memerlukan dukungan regulasi yang adaptif, terukur, dan akuntabel. Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan LPBBTI adalah pelaporan data transaksi Pendanaan secara tepat waktu, akurat, dan dapat diverifikasi oleh otoritas. Untuk itu, diperlukan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga yang memiliki mandat pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data antar Penyelenggara secara sistematis dan aman. Sistem ini menjadi sarana penting dalam memperoleh dan menyediakan informasi mengenai Penerima Dana, yang selanjutnya digunakan untuk penguatan tata kelola, penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara, dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  Di samping itu, ketersediaan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, *real-time*, dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung kelancaran proses Pendanaan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sistem ini juga menjadi prasyarat penting dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, transparan, dan berdaya saing.  Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Pemintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat infrastruktur pengawasan, serta meningkatkan kualitas tata kelola industri pendanaan digital secara keseluruhan. |  |  |
| 1. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi pengguna; |  |  |  |
| 1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyediaan pendanaan yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, penerapan manajemen risiko yang memadai oleh Penyelenggara, serta penguatan pengawasan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan suatu sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi. |  |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Pemintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PUSAT DATA TRANSAKSI PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. |  |  |  |
| 1. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. |  |  |  |
| 1. Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. |  |  |  |
| 1. Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan. |  |  |  |
| 1. Pengguna LPBBTI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Dana dan Penerima Dana. |  |  |  |
| 1. Data Transaksi Pendanaan adalah laporan perkembangan data transaksi Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. |  |  |  |
| 1. Informasi Penerima Dana adalah informasi mengenai Penerima Dana, Pendanaan yang diterima Penerima Dana, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Data Transaksi Pendanaan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. Pusat Data Transaksi Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pusat Data Transaksi Pendanaan adalah sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Penyelenggara dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Penyelenggara dimaksud. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ Penyelenggara yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Penyelenggara untuk kepentingan Penyelenggara, sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara serta mewakili Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Penyelenggara agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LAPORAN TRANSAKSI PENDANAAN DAN KOREKSI TRANSAKSI PENDANAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Pertama |  |  |  |
| Data Transaksi Pendanaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan Data Transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Pusat Data Transaksi Pendanaan dengan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan dibuktikan dengan tanda terima bahwa penyampaian telah berhasil beserta jumlah data yang telah dilaporkan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian data transaksi kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau pengumuman melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Penyelenggara. |  |  |
| 1. Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: |  |  |  |
| 1. informasi tentang Pengguna | Cukup jelas. |  |  |
| 1. informasi transaksi Pendanaan; dan | Yang dimaksud dengan “informasi transaksi Pendanaan” meliputi informasi terkait pengajuan Pendanaan dan pemberian Pendanaan, termasuk posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi, jumlah transaksi, dan jumlah penyaluran. |  |  |
| 1. infomasi kualitas Pendanaan. | Yang dimaksud dengan “informasi kualitas Pendanaan” adalah informasi mengenai pembayaran Pendanaan yang terdiri dari tanggal jatuh tempo, status pembayaran, denda, dan nilai pembayaran. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Data transaksi Pendanaan dilaporkan oleh kantor pusat Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Data transaksi Pendanaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Penyelenggara yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan Data Transaksi Pendanaan untuk pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 12 pada bulan keempat terhitung sejak mendapatkan persetujuan izin usaha sebagai Penyelenggara oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Penyelenggara wajib melakukan koreksi Data Transaksi Pendanaan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Data Transaksi Pendanaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas dasar: |  |  |  |
| * + - * 1. temuan Penyelenggara; atau |  |  |  |
| * + - * 1. temuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan/atau Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
| 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
| 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara, Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENYAMPAIAN DAN KOREKSI DATA TRANSAKSI PENDANAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Periode Penyampaian dan Koreksi Data Transaksi Pendanaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan Data Transaksi Pendanaan secara waktu nyata (*real time*). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Pusat Data Transaksi Pendanaan belum dapat menerima Data Transaksi Pendanaan secara waktu nyata (*real time*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan penyampaian Data Transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara harian. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan koreksi Data Tansaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas dasar: | Cukup jelas. |  |  |
| temuan Penyelenggara, paling lambat tanggal 12 hari berikutnya setelah hari penyampaian Data Transaksi Pendanaan; atau |  |  |  |
| temuan Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat sesuai dengan batas waktu komitmen Penyelenggara dalam pemeriksaan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, koreksi Data Transaksi Pendanaan disampaikan pada hari kerja berikutnya. | Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan cuti bersama. Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tanggal berakhirnya penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi: | Cukup jelas. |  |  |
| kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (*database*) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau |  |  |  |
| kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Data Transaksi Pendanaan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan pada tanggal penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan secara daring melalui Pusat Data Transaksi Pendanaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan dapat menyampaikan secara luring paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung. | Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan secara daring, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.  Yang dimaksud dengan “penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan secara luring” adalah penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam bentuk cakram padat atau diska lepas.  Dokumen pendukung antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Penyelenggara mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Penyelenggara mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan Pusat Data Transaksi Pendanaan secara daring.  Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan yang disampaikan secara luring oleh Penyelenggara dan diunggah oleh Otoritas Jasa Keuangan tetap menjadi tanggung jawab Penyelenggara. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan secara daring dan secara luring sampai dengan batas akhir waktu penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan. | Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Penyelenggara. |  |  |
| 1. Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. departemen yang menjalankan fungsi pengelolaan data dan statistik, bagi Penyelenggara yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau |  |  |  |
| 1. kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Penyelenggara yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi kerusakan pada Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada sistem dan/atau jaringan komunikasi data, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara untuk menyampaikan kembali Data Transaksi Pendanaan dan/atau data transaksi Pendanaan. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan kembali Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan/atau Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
| 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
| 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud, Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENGKINIAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian Data Transaksi Pendanaan pada Pusat Data Transaksi Pendanaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara dicabut izin usaha, pihak yang ditunjuk menyelesaikan kewajiban Penyelenggara wajib melakukan pengkinian Data Transaksi Pendanaan. | Pihak yang ditunjuk antara lain tim likuidasi. |  |  |
| 1. Pengkinian Data Transaksi Pendanaan pada Pusat Data Transaksi Pendanaan dalam hal Penyelenggara tidak mampu melakukan pengkinian Data Transaksi Pendanaan pada Pusat Data Transaksi Pendanaan karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Penyelenggara. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETERBUKAAN KEPADA PENERIMA DANA DAN INFORMASI PENERIMA DANA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Keterbukaan kepada Penerima Dana |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Penyelenggara wajib memberitahukan kepada Penerima Dana mengenai penyampaian Data Transaksi Pendanaan yang bersangkutan ke dalam Pusat Data Transaksi Pendanaan. | Pemberitahuan kepada Pengguna dapat dilakukan melalui sarana antara lain sistem elektronik Penyelenggara, formulir, surat elektronik (*electronic mail*), dan pesan singkat (*short messages service*). |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Informasi Penerima Dana |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara dapat meminta Informasi Penerima Dana. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Cakupan Informasi Penerima Dana yang dapat diminta oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. identitas Penerima Dana; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pemilik dan pengurus bagi Penerima Dana badan usaha dan badan hukum; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pendanaan yang diterima Penerima Dana; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. manfaat ekonomi; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Agunan, jika ada; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penjamin, jika ada; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. kualitas Pendanaan; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. informasi lain yang diperlukan. | Informasi lain yang diperlukan antara lain berupa informasi keuangan Pemberi Dana. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara yang telah memenuhi kewajiban penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat meminta Informasi Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Pusat Data Transaksi Pendanaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permintaan Informasi Penerima Dana secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Penyelenggara dan/atau kantor cabang Penyelenggara. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Penerima Dana melalui Pusat Data Transaksi Pendanaan yang dilakukan oleh Penyelenggara, yang paling sedikit mengenai: | Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Penerima Dana baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi. |  |  |
| 1. tanggal permintaan; |  |  |  |
| 1. nomor identitas Penerima Dana; |  |  |  |
| 1. nama Penerima Dana; |  |  |  |
| 1. peruntukan Informasi Penerima Dana; dan |  |  |  |
| 1. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Penerima Dana. |  |  |  |
| 1. Penyelenggara dilarang menggunakan Informasi Penerima Dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Penyelenggara selain untuk: |  |  |  |
| 1. mendukung kelancaran proses penyaluran Pendanaan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menerapkan manajemen risiko dan/atau memfasilitasi pengalihan risiko; | Contoh:  Penggunaan Informasi Penerima Dana untuk:   * + - 1. pemantauan Penerima Dana *existing*;       2. pelaksanaan audit; dan/atau       3. penerapan strategi *anti fraud*.   Penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon Penerima Dana dan *cross selling* diperkenankan menjadi bagian dari manajemen risiko namun terbatas hanya pada nasabah Penyelenggara. |  |  |
| 1. mengidentifikasi kualitas Penerima Dana untuk pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pengelolaan sumber daya manusia pada Penyelenggara; dan/atau | Contoh:  Penggunaan Informasi Penerima Dana untuk proses seleksi calon pegawai Penyelenggara. |  |  |
| 1. verifikasi untuk kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga. | Contoh:  Penggunaan Informasi Penerima Dana untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor Penyelenggara. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen terkait penggunaan Informasi Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk verifikasi penggunaan Informasi Penerima Dana. | Contoh:  Dokumen proses penyaluran Pendanaan antara lain mencakup dokumen pengajuan aplikasi permohonan Pendanaan kepada Penyelenggara. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara hanya dapat mengakses data Informasi Penerima Dana paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Penerima Dana yang dilaporkan pada posisi data 2 (dua) bulan laporan sebelumnya. | Contoh:  Apabila Penyelenggara menyampaikan laporan 1.000 (seribu) Penerima Dana pada posisi data bulan Februari 2026, Penerima Dana dapat mengakses data informasi Penerima Dana paling banyak 1.000 (seribu) Penerima Dana di bulan April 2026. |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara membutuhkan Informasi Penerima Dana melebihi batas paling banyak permintaan Informasi Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Kebutuhan Informasi Penerima Dana yang melebihi batas paling banyak permintaan Informasi Penerima Dana antara lain jika:   * + - * 1. terdapat kebutuhan Penyelenggara untuk memahami Penerima Dana akhir dalam proses penyaluran Pendanaan Penyelenggara sesuai dengan kegiatan bisnis Penyelenggara;   1. Penyelenggara merupakan Penyelenggara baru; dan/atau  1. Penyelenggara melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan konversi. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permintaan Informasi Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Penyelenggara dilarang memberikan dan/atau memperjualbelikan informasi Pengguna yang diperoleh dari Pusat Data Transaksi Pendanaan kepada pihak lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Penyelenggara bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Penerima Dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
| 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
| 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara, Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENANGGUNG JAWAB, AUDIT INTERNAL, SERTA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Penanggung Jawab |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menunjuk anggota Direksi pada Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penyajian laporan Data Transaksi Pendanaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyampaikan Data Transaksi Pendanaan; |  |  |  |
| 1. melakukan verifikasi Data Transaksi Pendanaan; dan |  |  |  |
| 1. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna Pusat Data Transaksi Pendanaan di internal Penyelenggara. |  |  |  |
| 1. melakukan pengamanan data informasi Pengguna. |  |  |  |
| 1. Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) serta disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara. | Prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian Data Transaksi Pendanaan, verifikasi Data Transaksi Pendanaan dengan satuan kerja atau unit yang melaksanakan fungsi administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna Pusat Data Transaksi Pendanaan. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menyampaikan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapatkan persetujuan izin usaha sebagai Penyelenggara oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang melakukan fungsi administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna Pusat Data Transaksi Pendanaan di internal Penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan; dan |  |  |  |
| 1. melakukan penyesuaian hak akses pengguna Pusat Data Transaksi Pendanaan di internal Penyelenggara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Audit Internal |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib melakukan audit internal terhadap pelaksanaan Pusat Data Transaksi Pendanaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Audit internal pelaksanaan Pusat Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup pelaporan dan permintaan Informasi Penerima Dana. | Audit pelaksanaan Pusat Data Transaksi Pendanaan dapat berupa audit khusus maupun audit umum dengan ruang lingkup pemeriksaan mencakup Pusat Data Transaksi Pendanaan, baik yang dilakukan melalui pemeriksaan fisik maupun melalui sistem informasi. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Kebijakan dan Prosedur |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan yang paling sedikit mencakup: |  |  |  |
| 1. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang melakukan verifikasi dan menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data; | Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data” antara lain pelaksanaan rekam cadang (*back-up*) data Pengguna setelah dilakukan penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan secara berkala setiap bulan serta melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan secara berkala. |  |  |
| 1. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan ketepatan waktu Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan kahar untuk memastikan kesinambungan penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan/atau koreksi Data Transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta wewenang dan tanggung jawab pegawai yang ditunjuk. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Penerima Dana yang paling sedikit mencakup: |  |  |  |
| 1. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Informasi Penerima Dana; |  |  |  |
| 1. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi Penerima Dana, termasuk memastikan penggunaan Informasi Penerima Dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5); |  |  |  |
| 1. penatausahaan Informasi Penerima Dana; dan |  |  |  |
| 1. pengamanan Informasi Penerima Dana. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 20, Pasal 21, dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
| 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
| 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud, Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PENGAWASAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap Penyelenggara terkait pelaksanaan Pusat Data Transaksi Pendanaan. | Pengawasan dilakukan melalui:   * + - * 1. pengawasan secara langsung adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Penyelenggara; dan/atau  1. pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Data Transaksi Pendanaan yang disampaikan oleh Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau informasi lain yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan Pusat Data Transaksi Pendanaan berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu. | Kebijakan terkait pelaksanaan Pusat Data Transaksi Pendanaan berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain penyesuaian cakupan informasi Data Transaksi Pendanaan yang disebabkan ketidaklengkapan informasi Penyelenggara untuk Pendanaan yang dihapus buku. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menambahkan keterangan tautan mengenai informasi tertentu pada Pusat Data Transaksi Pendanaan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
| 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
| 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau |  |  |  |
| 1. denda administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud, Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Penetapan kebijakan didasarkan pada pertimbangan antara lain:   * + - * 1. mendukung kebijakan nasional.  1. menjaga kepentingan publik; 2. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau 3. menjaga persaingan usaha yang sehat.   Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri LPBBTI tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait.  Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri LPBBTI senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.  Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat.  Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan LPBBTI dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mulai berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai laporan Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan permintaan Informasi Penerima Dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat Pusat Data Transaksi Pendanaan telah dapat memenuhi permintaan Informasi Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,  SUPRATMAN ANDI AGTAS  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... |  |  |